

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, DAN OPINI AUDIT  
TERHADAP KINERJA KEAUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018)**

***THE INFLUENCE OF GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, AND AUDIT  
OPINION ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE***

*(Case Study in District/City of West Java Province in 2014 -2018)*

Rudythia Dwitama<sup>1</sup>, Sri Rahayu S.E., M.Ak., Ak., CA<sup>2</sup>

**Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom**

<sup>1</sup>rudythiadwitama@student.telkomuniversity.ac.id <sup>2</sup>srirahayu@telkomuniversity.ac.id

**Abstrak**

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, berarti pemerintah daerah sudah berhasil menjalankan otonomi daerah dengan optimal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program atau kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan. Kinerja Keuangan Pemerintah dapat diukur menggunakan Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit secara simultan maupun secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel jenuh sehingga sampel menggunakan seluruh populasi yaitu 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dengan tahun penelitian 2014-2018. Sehingga sampel yang didapat yaitu 135 unit sampel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi statistik yaitu *Eviews10*.

Berdasarkan hasil penelitian, Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Secara parsial, Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi, *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas, sedangkan pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi, Opini Audit berpengaruh positif.

**Kata Kunci:** Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, Opini Audit, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Kinerja Keuangan Pemerintah

**Abstract**

*Local government financial management has become a matter that must be considered by each local government. Good financial management will result in good local government financial performance, meaning that the regional government has successfully implemented regional autonomy optimally. Regional Government Financial Performance is a picture of the achievement of a program or policy that has been planned by the regional government for a certain period that can be measured using financial indicators. Government Financial Performance can be measured using the Efficiency Ratio and Effectiveness Ratio.*

*This study aims to analyze the effect of Government Size, Intergovernmental Revenue, and Audit Opinion simultaneously or partially on the Financial Performance of District and City Governments in West Java Province in 2014-2018. This research uses quantitative methods with descriptive research types and hypotheses. Hypothesis testing in this study uses saturated sampling so that the sample uses the entire population of 27 Regencies and Cities in West Java Province with the 2014-2018 research year. So the sample obtained is 135 sample units. Analysis of the data used in this study is panel data regression analysis using statistical applications namely Eviews10.*

*Based on the results of the study, Government Size, Intergovernmental Revenue, and Audit Opinion simultaneously influence the Financial Performance of Local Governments. Partially, Government Size has a significant negative effect on Regional Government Financial Performance, Intergovernmental Revenue has no significant effect on*

*Regional Government Financial Performance, and Audit Opinion does not significant influence Regional Government Financial Performance*

**Keywords:** *Government Size, Intergovernmental Revenue, Audit Opinion, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio Regional Government Financial Performance*

## 1. Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti tercantum dalam UU No.32/2004 menyebutkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Pemberian otonomi ini, pemerintah diwajibkan untuk mengelola kinerjanya, baik kinerja keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang ada yaitu melemahnya kinerja dan pelambatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan<sup>[1]</sup>. Hal tersebut terjadi pada tahun anggaran 2017, dimana pada tahun anggaran 2016 Realisasi PAD Jawa Barat mencapai Rp.17,04 triliun atau naik 6,3% dari tahun sebelumnya. Namun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, target PAD Jawa Barat justru turun 3,04% menjadi hanya Rp 16,5 triliun dari realisasi tahun sebelumnya. Angka tersebut setara 50% dari total anggaran Jawa Barat sebesar Rp 32,74 triliun<sup>[2]</sup>.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan<sup>[3]</sup>. Kinerja Keuangan dapat diukur dengan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi<sup>[4]</sup>. Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif).

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 1.1 Dasar Teori

#### 1.1.1 Ukuran Pemerintah

Ukuran Pemerintah adalah gambaran besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktifitas<sup>[5]</sup>. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan dalam menentukan ukuran pemerintah yaitu total aset. Total aset dipilih karena nilainya lebih konstan dibandingkan dengan jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktifitas pemerintah daerah<sup>[5]</sup>.

**Ln Total Aset**

#### 2.1.2 Intergovernmental Revenue

*Intergovernmental Revenue* atau biasa disebut dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Berikut merupakan pengukuran *Intergovernmental Revenue*.

$$\text{intergovernmental revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### 2.1.3 Opini Audit

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Audit adalah bentuk pembuktian dari independen yang dilakukan oleh ahli auditor. Opini dalam laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan pada Peraturan yang memiliki pengaruh langsung serta material terhadap penyajian laporan keuangan<sup>[6]</sup>. Pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran dari laporan keuangan disebut dengan opini audit. Berikut pengukuran opini audit menggunakan skala skor 1 sampai dengan 5.<sup>[7]</sup>

Tabel 2. 5 Nilai Opini Audit

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberi Pendapat (TMP)	1

### 1.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan selama proses kegiatan yang telah dicapai dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik, akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif<sup>[8]</sup>. Pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan

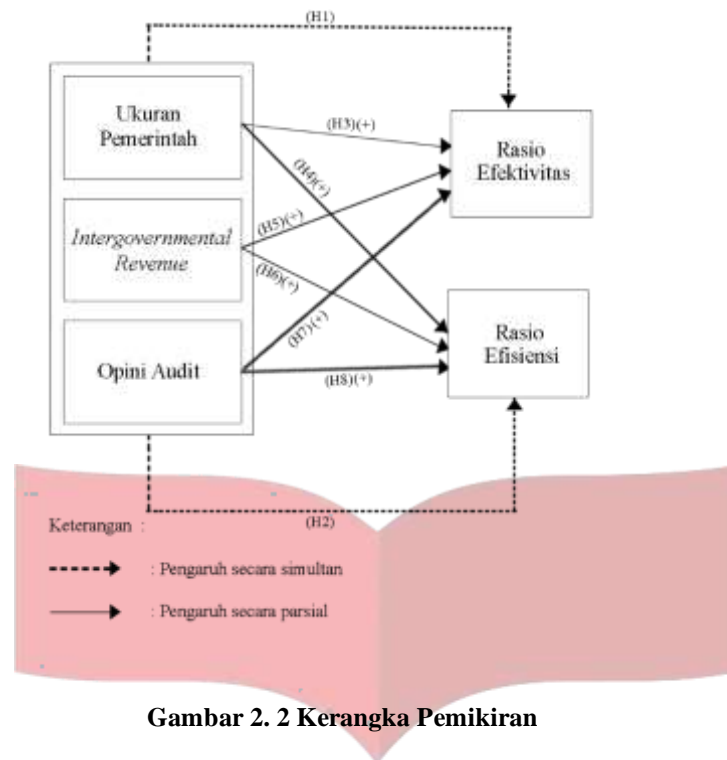
Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan programnya serta akan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat<sup>[8]</sup>. Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah diharapkan juga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan lengkap untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan akan meningkat.

### 2.2.2 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, karena pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya, sehingga akan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerahnya. Semakin besar dana perimbangan yang diterima akan semakin besar anggaran yang dapat dikelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat<sup>[9]</sup>.

### 2.2.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan

Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah<sup>[4]</sup>.



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

- H1 : Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas.
- H2 : Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi.
- H3 : Ukuran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas.
- H4 : Ukuran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi.
- H5 : *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas.
- H6 : *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi.
- H7 : Opini Audit secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas.
- H8 : Opini Audit secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi.

## 2.4 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh dan diperoleh sampel sebanyak 135 unit sampel. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

	Ukuran Pemerintah (Ln)	Intergovernmental Revenue	Opini Audit	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Efektivitas (%)
MEAN	29.11	0.56	4.5	95,03	101,41
MEDIAN	29.01	0.58	5	96,46	103,22
MAXIMUM	31.38	0.85	5	113,13	133,26
MINIMUM	27.93	0.34	1	79,93	43,41
Std. Dev	0.72	0.10	0.93	7,33	13,32
Observation	135	135	135	135	135

Sumber : *Eviews10*

Tabel di atas merupakan hasil analisis statistik deskriptif. Dari keseluruhan variabel dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata pada masing-masing variabel. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini bersifat tidak bervariasi atau mengelompok.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.2 Analisis Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi linier data panel dalam penelitian ini menghasilkan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

Tabel 3.6

**Hasil Regresi Data Panel – Random Effect Model**

Dependent Variable: EFK  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 07/03/20 Time: 22:49  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 135  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1,032162	0.515508	2.002221	0.0473
UP	0,103977	0.088422	1.175910	0.2418
IR	-0,041603	0.090392	-0.460247	0.6461
OA	-0,058354	0.022196	-2.629075	0.0096

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.039147	0.4702
Idiosyncratic random		0.041555	0.5298

Weighted Statistics			
R-squared	0.067688	Mean dependent var	0.607379
Adjusted R-squared	0.046337	S.D. dependent var	0.042140
S.E. of regression	0.041153	Sum squared resid	0.221852
F-statistic	3.170304	Durbin-Watson stat	1.722361
Prob(F-statistic)	0.026550		

$$EFK = 1,032162 + 0,103977UP - 0,041603IR - 0,058354OA + \varepsilon$$

Persamaan Regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta bernilai positif 1,032162 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit bernilai 0, maka variabel dependen pada regresi yaitu Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas bernilai sebesar 1,032162 satuan.
- Koefisien regresi X1 yaitu Ukuran Pemerintah sebesar 0,103977 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Ukuran Pemerintah sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas juga akan mengalami kenaikan 0,103977 satuan.
- Koefisien regresi X2 yaitu *Intergovernmental Revenue* sebesar -0,041603 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada *Intergovernmental Revenue* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas juga akan mengalami penurunan -0,041603 satuan.
- Koefisien regresi X3 yaitu Opini Audit sebesar -0,058354 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Opini Audit sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas juga akan mengalami penurunan -0,058354 satuan.

Tabel 3.7

Hasil Regresi Data Panel – *Common Effect Model*

Dependent Variable: EFS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/04/20 Time: 00:20  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.429604	0.211817	6.749251	0.0000
UP	-0.006467	0.032625	-0.198234	0.8432
IR	-0.044347	0.043260	-1.025124	0.3072
OA	0.026520	0.010133	2.617217	0.0099
R-squared	0.059733	Mean dependent var		1.397037
Adjusted R-squared	0.038200	S.D. dependent var		0.024252
S.E. of regression	0.023784	Akaike info criterion		-4.610384
Sum squared resid	0.074107	Schwarz criterion		-4.524302
Log likelihood	315.2009	Hannan-Quinn criter.		-4.575403
F-statistic	2.774049	Durbin-Watson stat		1.738694
Prob(F-statistic)	0.044009			

$$EFS = 1,429604 - 0,006467UP - 0,044347IR + 0,026520OA + \epsilon$$

Persamaan Regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

5. Konstanta bernilai positif 1,429604 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit bernilai 0, maka variabel dependen pada regresi yaitu Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi bernilai sebesar 1,429604 satuan.
6. Koefisien regresi X1 yaitu Ukuran Pemerintah sebesar -0,006467 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Ukuran Pemerintah sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi juga akan mengalami penurunan -0,006467 satuan.
7. Koefisien regresi X2 yaitu *Intergovernmental Revenue* sebesar -0,044347 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada *Intergovernmental Revenue* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi juga akan mengalami penurunan -0,044347 satuan.
8. Koefisien regresi X3 yaitu Opini Audit sebesar 0,026520 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Opini Audit sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi juga akan mengalami kenaikan 0,026520 satuan.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

#### 3.3.2 Koefisien Determinasi

Tabel 3.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Rasio Efektivitas)

Weighted Statistics			
R-squared	0.067688	Mean dependent var	0.607379
Adjusted R-squared	0.046337	S.D. dependent var	0.042140
S.E. of regression	0.041153	Sum squared resid	0.221852
F-statistic	3.170304	Durbin-Watson stat	1.722361
Prob(F-statistic)	0.026550		

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,046337 atau 4,63% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit hanya dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan sebesar 4,63%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

Tabel 3.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Rasio Efisiensi)

R-squared	0.059733	Mean dependent var	1.397037
Adjusted R-squared	0.038200	S.D. dependent var	0.024252
S.E. of regression	0.023784	Akaike info criterion	-4.610384
Sum squared resid	0.074107	Schwarz criterion	-4.524302
Log likelihood	315.2009	Hannan-Quinn criter.	-4.575403
F-statistic	2.774049	Durbin-Watson stat	1.738694
Prob(F-statistic)	0.044009		

Berdasarkan Tabel 3.9, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,038200 atau 3,82% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit hanya dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan sebesar 3,82%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

#### 3.3.3 Pengujian Hipotesis secara Simltan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 3.8, hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai probability (F-statistic) sebesar 0,026550 dimana nilai tersebut  $< 0,05$  dari taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efektivitas.

Berdasarkan Tabel 3.9, hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai probability (F-statistic) sebesar 0,044009 dimana nilai tersebut  $< 0,05$  dari taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efisiensi.



### 3.3.4 Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Tabel 3.10

Hasil Uji Parsial (Rasio Efektivitas)

Dependent Variable: EFK  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 07/03/20 Time: 22:49  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 135  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.032162	0.515508	2.002221	0.0473
UP	0.103977	0.088422	1.175910	0.2418
IR	-0.041603	0.090392	-0.460247	0.6461
OA	-0.058354	0.022196	-2.629075	0.0096

Berdasarkan Tabel 3.10, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai probability (t-statistic) pada variabel Ukuran Pemerintah sebesar 0,2418 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efektivitas.
- Nilai probability (t-statistic) pada variabel *Intergovernmental Revenue* sebesar 0,6461 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efektivitas.
- Nilai probability (t-statistic) variabel Opini Audit sebesar 0,0096 dimana nilai tersebut  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Opini Audit secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efektivitas.

Pembahasan hasil :

- Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut, koefisien regresi variabel ukuran pemerintah memiliki nilai sebesar 0,103977 yang artinya memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai probability pada ukuran pemerintah yaitu 0,2418 dan taraf signifikansi 0,05 berarti nilai probability lebih besar daripada taraf signifikansi atau  $0,2418 > 0,05$ , yang artinya ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, besar atau kecilnya ukuran pemerintah tidak menjadi tolak ukur meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut, koefisien regresi variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai sebesar -0,041603 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai probability pada *intergovernmental revenue* yaitu 0,6461 dan taraf signifikansi 0,05 berarti nilai probability lebih besar daripada taraf signifikansi atau  $0,6461 > 0,05$ , yang artinya *intergovernmental revenue* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memengaruhi kinerja keuangan.
- Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut, koefisien regresi variabel opini audit memiliki nilai sebesar -0,058354 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai probability pada opini audit yaitu 0,0096 dan taraf signifikansi 0,05 berarti nilai probability lebih kecil daripada taraf signifikansi atau  $0,0096 < 0,05$ , yang artinya opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pemberian opini audit oleh BPK berdasarkan catatan yang diberikan dapat menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan kinerja keuangannya.

**Tabel 3.11**  
**Hasil Uji Parsial (Rasio Efisiensi)**

Dependent Variable: EFS  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/20 Time: 00:20  
Sample: 2014 2018  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 27  
Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.429604	0.211817	6.749251	0.0000
UP	-0.006467	0.032625	-0.198234	0.8432
IR	-0.044347	0.043260	-1.025124	0.3072
OA	0.026520	0.010133	2.617217	0.0099
R-squared	0.059733	Mean dependent var		1.397037
Adjusted R-squared	0.038200	S.D. dependent var		0.024252
S.E. of regression	0.023784	Akaike info criterion		-4.610384
Sum squared resid	0.074107	Schwarz criterion		-4.524302
Log likelihood	315.2009	Hannan-Quinn criter.		-4.575403
F-statistic	2.774049	Durbin-Watson stat		1.738694
Prob(F-statistic)	0.044009			

Berdasarkan Tabel 3.11, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai probability (t-statistic) pada variabel Ukuran Pemerintah sebesar 0,8432 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. berdasarkan Rasio Efisiensi.
- Nilai probability (t-statistic) pada variabel *Intergovernmental Revenue* sebesar 0,3072 dimana nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efisiensi.
- Nilai probability (t-statistic) variabel Opini Audit sebesar 0,0099 dimana nilai tersebut  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Opini Audit secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berdasarkan Rasio Efisiensi.

Pembahasan hasil :

- Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut, koefisien regresi variabel ukuran pemerintah memiliki nilai sebesar -0,006467 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai probability pada ukuran pemerintah yaitu 0,8432 dan taraf signifikansi 0,05 berarti nilai probability lebih besar daripada taraf signifikansi atau  $0,8432 > 0,05$ , yang artinya ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, besar atau kecilnya ukuran pemerintah tidak mempengaruhi efisiensi kinerja keuangan.
- Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut, koefisien regresi variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai sebesar -0,044347 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai probability pada *intergovernmental revenue* yaitu 0,3072 dan taraf signifikansi 0,05 berarti nilai probability lebih besar daripada taraf signifikansi atau  $0,3072 > 0,05$ , yang artinya *intergovernmental revenue* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memengaruhi efisiensi kinerja keuangan.
- Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut, koefisien regresi variabel opini audit memiliki nilai sebesar 0,026520 yang artinya memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai probability pada opini audit yaitu 0,0099 dan taraf signifikansi 0,05 berarti nilai probability lebih kecil daripada taraf signifikansi atau  $0,0099 < 0,05$ , yang artinya opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pemberian opini audit oleh BPK berdasarkan catatan yang diberikan oleh BPK menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi kinerja keuangan, namun apabila pemerintah daerah kedepannya belum bisa mengevaluasi catatan yang diberikan oleh BPK, maka akan mempengaruhi efisiensi kinerja keuangannya, sehingga kinerja akan menurun.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang dipaparkan pada poin 3, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Secara simultan atau bersama-sama, Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue* dan Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.
2. Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.
3. *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.
4. Opini Audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas dan berdasarkan Rasio Efisiensi, Opini Audit berpengaruh positif secara signifikan.

### 4.2 Saran

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada para pembaca untuk pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus pada bidang sektor publik. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel lain dan menambah periode penelitian sehingga diharapkan penelitian tersebut mampu menjelaskan lebih banyak variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, sebaiknya dapat mengalokasikan Dana Peimbangan secara tepat dengan mempertimbangkan daerah yang belum mampu untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk Pemerintah yang telah mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, agar dapat memaksimalkan pengelolaan keuangannya, dikarenakan dalam opini tersebut masih terdapat catatan-catatan penyimpangan yang perlu diperbaiki untuk perbaikan pengelolaan keuangan kedepannya. Dan diharapkan hasil penelitian dapat menambah sumber informasi bagi pihak pemerintahan terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan,

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Reporter. (2020, Mei 28). Ihsanudin Minta Kinerja Gubernur Ridwan Kamil Dievaluasi. Retrieved from kabarsebelas: <https://kabarsebelas.com/2020/05/28/ihsanudin-minta-kinerja-gubernur-ridwan-kamil-dievaluasi/> [Accessed 2 June 2020]
- [2] Databoks. (2018, Februari 19) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat. Retrieved from katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/19/perkembangan-pendapatan-asli-daerah-jawa-barat> [Accessed 2 June 2020]
- [3] Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik & Bisnis*, 110-120.
- [4] Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AT-TASYRI'*, 9-21.
- [5] Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*, 679-692.
- [6] Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1453-1481.
- [7] Masdiantini, P. R., & Erawati, N. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1150-1182.
- [8] Novia, R., & Kartim. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 30-37.
- [9] Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 27-34.